

BERI KERINGANAN KEPEMILIKAN RUMAH PERTAMA

Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bebas BPHTB

YOGYA (KR) - Selain pembebasan retribusi untuk izin perse-tujuan bangunan gedung (PBG), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga dibebaskan dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Hal ini guna memberikan keringanan atas kepemilikan rumah pertama bagi golongan MBR tersebut.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya M Rohmad Romadhon, menjelaskan pembebasan BPHTB bagi golongan MBR merupakan itu kebijakan pemerintah pusat untuk mendukung program tiga juta rumah. Pemkot Yogya sudah mengaturnya melalui Perwal 84/2024 tentang Pembebasan BPHTB Bagi MBR, dan berlaku tahun ini. "Pembebasan BPHTB bagi MBR diberikan untuk kepemilikan rumah pertama melalui jual beli.

Mengacu Perwal tersebut pembebasan BPHTB diberikan berdasarkan permohonan dari masyarakat," urainya, Minggu (19/1).

Bagi MBR dapat mengajukan pembebasan BPHTB setelah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan perkotaan tahun 2025. Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan BPHTB antara lain berkewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), memenuhi kriteria MBR dibuktikan dengan slip gaji

atau surat pernyataan penghasilan yang diketahui lurah sesuai KTP pemohon bagi pegawai sektor nonformal. Selain itu luas tanah tidak lebih dari 200 meter persegi dan berstatus bukan tanah pertanian yang dibuktikan dengan fotokopi alas hak, surat ukur terbaru dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Daerah.

Syarat lain yang wajib ialah itu merupakan kepemilikan rumah pertama bagi MBR dibuktikan dengan surat pernyataan belum memiliki rumah yang diketahui lurah sesuai dengan KTP pemohon. Adapun kriteria MBR mengacu perwal didasarkan pada besaran penghasilan. Besaran penghasilan MBR di daerah per-bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp 7 juta, kawin sebesar Rp 8 juta, dan satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat sebesar Rp 8 juta.

Sedangkan kriteria objek pembebasan

BPHTB yaitu luas lantai paling luas 36 meter persegi untuk pemilihan rumah umum dan satuan rumah susun, serta luas lantai paling luas 48 meter persegi untuk pembangunan rumah swadaya. "Masyarakat mengajukan permohonan pembebasan BPHTB secara tertulis kepada kepala perangkat daerah yaitu Kepala BPKAD Kota Yogya melalui loket pelayanan pajak daerah di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogya," terangnya.

Pelayanan pengajuan pembebasan BPHTB di loket pelayanan pajak daerah di MPP dilakukan pada hari dan jam kerja setelah proses cek kesesuaian PBB selesai. Menurutnya permohonan pembebasan BPHTB dilengkapi dengan alasan dan persyaratan. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap maka akan diterbitkan bukti penerimaan berkas oleh petugas loket pelayanan pajak daerah.

Kemudian petugas penelaah melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan berkas.

"Kepala perangkat daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan BPHTB bagi MBR berdasarkan penelitian administrasi terhadap kelengkapan berkas. Penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan," terang Rohmad.

Pihaknya mengingatkan pemohon pembebasan BPHTB untuk tetap mengajukan permohonan cek kesesuaian PBB. Termasuk mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah SSPD BPHTB (nihil) dan proses tera Bank BPD DIY untuk mendapatkan Nomor Transaksi Pajak Daerah (NTPD) yang digunakan untuk akses sistem Badan Pertanahan Nasional (BPN) saat balik nama dalam sertifikat. Di samping itu juga permohonan pengesahan BPHTB. (Dhi)-f

Guru Berperan Penting Tingkatkan Mutu Pendidikan

YOGYA (KR) - Guru merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kualitas guru yang baik akan berdampak pada mutu pendidikan di Indonesia. Karena selain menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa, guru juga menjadi fasilitator, motivator sekaligus sumber belajar. Oleh karena itu untuk bisa mewujudkan mutu pendidikan yang baik, sekolah harus memperhatikan tiga hal yaitu kualitas guru, lulusan dan sarana prasarana pembelajaran.

"Mutu pendidikan sekolah akan sangat dipengaruhi oleh kualitas guru. Peningkatan kualitas guru bisa dilakukan lewat kedisiplinan, karakter dan komitmen untuk meningkatkan kualitas diri. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, ada 3 hal yang perlu diperhatikan yaitu kualitas guru, lulusan dan sarana prasarana. Saya bangga SD Muh Sagan Yogyakarta terus berupaya mewujudkan semua itu," kata Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Gogot Suharwoto PhD saat berdialog dengan guru-guru dan komite di SD Muh Sagan Yogyakarta, Minggu (19/1).

Gogot mengatakan, ada sejumlah kebijakan baru dalam sistem pendidikan di



Gogot Suharwoto PhD bersama Suwarjo MPd dan jajaran lainnya sehubungan dengan dialog dengan guru-guru di SD Muh Sagan.

Indonesia menjadi tantangan sekaligus peluang bagi sekolah untuk bisa meningkatkan mutu dan kualitas. Meski untuk bisa menyebutkan diri dengan perubahan dan kondisi terkini tidak mudah serta membutuhkan proses. Tapi dirinya optimis SD Muh Sagan Yogyakarta bisa mewujudkan hal itu dengan baik. Komitmen dan kerja keras serta sinergitas yang telah dilakukan oleh seluruh warga sekolah menjadi modal besar dalam mewujudkan target-target yang sudah ditentukan.

Dalam kesempatan itu Kepala SD Muh Sagan Yogyakarta Suwarjo MPd mengungkapkan, peningkatan kualitas saat ini menjadi suatu keharusan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu sejumlah upaya terus dilakukan oleh SD Muh Sagan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Pe-

ingkatan mutu itu tidak hanya dilakukan untuk guru atau siswa, tapi juga sarana maupun prasarana pembelajaran. Walaupun dalam pelaksanaan tidak mudah dan sempat mengalami kendala, oleh karena itu dukungan dari pemerintah dan stakeholders terkait sangat dibutuhkan. Karena hanya dengan sinergitas peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia akan bisa diwujudkan.

"Sejumlah upaya terus kami lakukan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan. Baik berkaitan dengan pembelaan akademik, kualitas lulusan guru dan siswa sampai fasilitas pendukung lainnya. Awalnya memang tidak mudah, tapi dengan dukungan dari sejumlah pihak termasuk komite, pemerintah dan persyaratan semua jadi mudah," ungkapnya. (Ria)-f

SD Muhammadiyah Karangwaru Maju dan Bermutu



Yuliani Haryatun bersama PDM Kota Yogya, Majelis Dikdasmen dan PNF, Disdikpora Kota Yogya.

YOGYA (KR) - Gebyar Milad ke-56 SD Muhammadiyah Karangwaru Yogyakarta (Muhkarata) digelar di Lapangan Karangwaru Yogyakarta, Sabtu (18/1). Gebyar milad diisi berbagai kegiatan, senam sehat, bazar sembako, booth UMKM, lomba yel-yel, parade ekstrakurikuler dan cek kesehatan gratis.

Kepala SD Muhammadiyah Karangwaru Yogyakarta, Yuliani Haryatun SAg menuturkan milad ke-56 ini menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan SD Muhammadiyah Karangwaru. "Tahun ini saya masih diamanahi oleh PDM Kota Yogyakarta menjadi kepala sekolah periode ke-2 sampai dengan tahun 2028," katanya kepada KR di sela kegiatan.

Menurut Yuliani, dirinya bersama seluruh warga sekolah berkomitmen menjadikan SD Muhammadiyah Karangwaru maju dan bermutu

dalam pendidikan dan karakter siswa. Brand ini menjadi landasan dalam meningkatkan kualitas dan prestasi. "Kami bangga atas prestasi yang diperoleh para siswa baik dari segi akademik maupun non akademik di tingkat kemantren, kota, provinsi, nasional, maupun internasional," ujarnya.

Selain itu pihaknya juga berkomitmen menjadikan SD Muhammadiyah Karangwaru terus menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Penyelenggaraan gebyar milad ini mendapat dukungan dari paguyuban orang tua siswa, komite sekolah dan seluruh stakeholders yang ada di sekolah. "Kegiatan diikuti tak kurang 1.500 peserta terdiri siswa, orang tua siswa, guru, tamu undangan dan masyarakat sekitar," terang Yuliani.

Turut hadir antara lain, Kepala Bidang Pembinaan

SD Disdikpora Kota Yogyakarta Mujino SPd MAcc, Pengawas Sekolah, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta H Aris Madani SPdI MSI, Majelis Dikdasmen PNF PDM Kota Yogyakarta dan Mantri Pamong Praja Tegalarjo.

Menurut Yuliani, tahun ini SD Muhammadiyah Karangwaru memiliki brand, yaitu mewujudkan visi 'SD Muhammadiyah Karangwaru Maju dan Bermutu'. "Untuk mewujudkan cita-cita ini perlu menyatukan tekad yang bulat semua warga sekolah. Sebab kita butuh perjuangan serta kebiasaan-kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan. Sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) ada tujuh pembiasaan anak Indonesia Hebat," ujarnya.

Tujuh pembiasaan tersebut, kata Yuliani yaitu pembiasaan bangun pagi, pembiasaan beribadah, pembiasaan olahraga, pembiasaan makan sehat dan bergizi, pembiasaan gemar belajar, pembiasaan bermasyarakat dan pembiasaan tidur lebih awal.

"Harapan kami dengan anak-anak memiliki pembiasaan yang baik seperti yang telah dikampanyekan oleh Bapak Menteri Dikdasmen ini, mudah-mudahan cita-cita SD Muhammadiyah Karangwaru Maju dan Bermutu bisa tercapai dengan baik," pungkasnya. (Dev)-f

PEMKOT DORONG GRADUASI MANDIRI

500 KPM Dinyatakan Lulus PKH 2024

YOGYA (KR) - Sekitar 500 keluarga penerima manfaat (KPM) untuk peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Yogya tahun 2024 lalu dinyatakan lulus atau mengalami graduasi. Oleh karena itu pada tahun ini mereka tidak lagi menerima PKH dari Kementerian Sosial RI.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Supriyanto, menjelaskan graduasi kepesertaan PKH terbagi dalam dua aspek yakni alami dan mandiri. Pihaknya pun akan terus mengupayakan KPM PKH agar lulus secara mandiri. "Graduasi atau kelulusan berarti berakhirnya kepesertaan KPM dalam PKH. Hal ini bisa terjadi secara alami maupun mandiri. Graduasi alami terjadi ketika KPM tidak lagi memenuhi kriteria dari tujuh indikator penilaian, seperti adanya ibu hamil, balita, anak sekolah jenjang SD sampai SMA, lansia, atau anggota keluarga yang memiliki

disabilitas," paparnya, Minggu (19/1).

Sedangkan graduasi mandiri, lanjut Supriyanto, dilakukan dengan mendorong keluarga peserta PKH mengakhiri kepesertaan dengan kesadaran sendiri. Terutama hal ini karena kondisi sosial ekonomi mulai membaik sehingga tidak lagi menggantungkan bantuan dari pemerintah. "Di tahun 2023 total peserta PKH ada 12.489 KPM dan tahun 2024 itu turun menjadi 11.988 KPM. Artinya ada 501 KPM yang lulus atau graduasi ya bahasanya, ada yang alami dan juga mandiri. Dari persentasenya bisa dikatakan berimbang, 50 persen alami dan 50 persen mandiri," terangnya.

Pihaknya menyatakan Pemkot Yogya akan terus mendorong graduasi KPM secara mandiri yang dibuktikan dengan tingkat kesejahteraan meningkat. Salah satu upaya dorongan tersebut melalui peran pendamping PKH yang secara intens di lapangan mengamati peserta mana saja yang berpotensi. Potensi itu dilihat dari sisi pekerjaan atau usaha

yang dijalankan hingga penghasilan atau omset yang dihasilkan. "Intervensi program dalam hal ini adalah program pemberdayaan. Ketika ada KPM yang berpotensi akan kami usulkan agar mendapat dukungan lebih lanjut. Misalnya melalui program pemberdayaan dari Pemkot maupun dari Kementerian Sosial," ujarnya.

Sementara itu salah satu pendamping PKH dari Kemantren Gedongtengen Yunan Adianto, mengatakan dirinya sudah mendampingi KPM sejak tahun 2016. Perannya terlibat dalam proses bisnis PKH meliputi verifikasi dan validasi data, penyaluran bantuan sosial, pemutakhiran data, sosialisasi dan pendampingan hingga graduasi. "Kami terus memberikan pemahaman dan motivasi kepada PKM kalau bantuan itu sifatnya tidak selamanya, supaya tidak bergantung. Sehingga punya semangat untuk semakin berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kondisi ekonomi keluarga," katanya. (Dhi)-f

BAYARKAN DIVIDEN INTERIM RP20,33 TRILIUN,

Komitmen BRI Berikan Keuntungan Nyata Kepada Pemegang Saham, Terutama Negara



Direktur Utama BRI, Sunarso.

JAKARTA (KR) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham melalui pembayaran dividen interim sebesar Rp135 per lembar saham dengan total nilai mencapai Rp20,33 triliun pada Rabu, 15 Januari 2025.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa keputusan pembagian dividen ini merupakan wujud nyata dari dedikasi perseroan untuk memberikan keuntungan berkelanjutan bagi para pemegang saham. Langkah ini juga mencerminkan keyakinan BRI terhadap fundamental bisnis yang kuat serta prospek pertumbuhan yang menjanjikan di masa depan.

Sunarso mengungkapkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan pembagian dividen interim ini komitmen BRI untuk selalu memberikan keuntungan yang nyata kepada pemegang saham, terutama negara. "Ini adalah wujud pembuktian bahwa BRI berkomitmen untuk meng-create value dan memberikan keuntungan nyata kepada pemegang saham, terutama bagi negara sebagai pemegang saham mayoritas," ujarnya.

Dalam struktur kepemilikan saham BRI, diketahui bahwa negara menguasai 53,19% saham atau setara dengan 80,61 miliar lembar saham perseroan. Sisanya sebesar 46,81% atau setara dengan 70,95



KR - Istimewa

miliar lembar saham dimiliki oleh publik. Dengan demikian, dari total dividen interim Rp20,33 triliun, negara menerima Rp10,88 triliun, sementara pemegang saham publik mendapatkan Rp9,45 triliun.

Pembagian dividen ini bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi negara sebagai pemegang saham mayoritas, tetapi juga bagi masyarakat umum yang menjadi pemegang saham ritel. Seperti diketahui bahwa jumlah pemegang saham BRI merupakan yang terbanyak di Bursa Efek Indonesia dengan jumlah mencapai 653.251 pemegang saham (per Desember 2024). Dengan pemegang saham yang terus meningkat tersebut, maka jumlah yang menikmati keun-

tungan BRI juga akan semakin banyak, tak terkecuali ritel/masyarakat Indonesia, dan juga negara sebagai pemegang saham pengendali.

Di samping itu, Sunarso menambahkan bahwa pertimbangan BRI membagikan dividen interim ini menunjukkan keberhasilan BRI dalam menjaga kinerja keuangannya, yang didukung oleh modal yang kuat dan likuiditas memadai. Sebagaimana ditunjukkan oleh rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) dan pengelolaan likuiditas internal yang baik. Hal ini ditunjukkan dari CAR BRI per September 2024 yang mencapai sebesar 26,76% dan Loan Deposit Ratio (LDR) Bank yang terjaga di level 89,18%. "Dengan likuiditas yang memadai dan permodalan yang kuat tersebut, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh lebih baik," ujar Sunarso.

Selain menjadi sinyal positif bagi pasar modal Indonesia. Langkah strategis BRI membagikan dividen interim ini juga menunjukkan konsistensi BRI dalam menjalankan transformasi bisnisnya, tidak hanya untuk mempertahankan kinerja, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan seluruh stakeholder. Dengan fundamental yang kuat, BRI optimis dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi nasional. (*)



Bayarkan Dividen Interim Rp20,33 Triliun, Komitmen BRI Berikan Keuntungan Nyata kepada Pemegang Saham dan Negara